
Wawasan Kebangsaan

Yudi Latif, MA. PhD



THAILAND

LAOS

CAMBODIA

VIETNAM

PHILIPPINES

Philippine Sea

MYANMAR

Gulf of Thailand

South China Sea

Sulu Sea

FEDERATED STATES OF MICRONESIA

PALAU

PACIFIC OCEAN

Banda Aceh

Medan

MALAYSIA

BRUNEI

MALAYSIA

Celebes Sea

Strait of Malacca

SINGAPORE

Pontianak

BORNEO

Molucca Sea

Padang

Palembang

Balikpapan

INDONESIA

Manado

HALMAHERA

Bandar Lampung

GREATER SUNDA ISLANDS

Makassar Strait

MOLUCCAS

SERAM

Ambon

Jayapura

NEW GUINEA
PAPUA NEW GUINEA

INDIAN OCEAN

Jakarta

Java Sea

Ujungpandang

Banda Sea

Sunda Strait

Bandung

JAVA

Surabaya

Flores Sea

Merauke

LESSER SUNDA ISLANDS

TIMOR-LESTE

Arafura Sea

Timor Sea

Kupang

CHRISTMAS ISLAND (Austl.)



AUSTRALIA

0 100 200 300 400 miles

0 200 400 600 km

RAND McNALLY

Modal Sosial (Social Capital)

- **Modal jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas sosial yang mampu menyatukan keragaman kepingan-kepingan kepentingan pribadi dan kelompok ke dalam suatu komunitas persaudaraan bersama, yang menjadi tumpuan rasa saling percaya (*mutual trust*).**
- **Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus diikat oleh kesamaan basis moralitas (*shared values*).**

Moral Kemajuan

- **“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar”**
- **{John Gardner, 1992}**

Etika sebagai Basis Kemakmuran

- **Bisnis sebagai aktivitas sosial tak bisa lepas dari imperatif moral. Bahwa berbuat etis itu menciptakan rasa percaya (trust). Trust menumbuhkan hubungan yang kuat; dan dari hubungan itu lahirlah nilai (tambah). Bila kita bisa membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan serta mampu menciptakan nilai (tambah) secara efektif dan efisien, tak pelak lagi akan menghasilkan uang.**
- **Hidup etis dan bertindak etis itu bukanlah suatu kemewahan yang sia-sia; malahan bisa jadi sumber daya kunci yang powerful bagi pencapaian keunggulan kompetitif, yang dapat menumbuhkan kemakmuran secara lebih lestari.**

Inti Moral Publik

Menurut Jonathan Haidt (2012)

Ada Enam nilai inti moral publik.

1. **Care:** peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama .
2. ***Fairness:*** rasa keadilan dan kepantasan.
3. **Liberty:** kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia.
4. **Loyalty:** kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama.
5. **Authority:** respek terhadap otoritas yang disepakati bersama.
6. **Sanctity:** menghormati nilai-nilai yang dipandang paling “suci” (utama).

Dasar ontologis Pancasila adalah kehendak mencari **titik temu** ("persetujuan") dalam menghadirkan kemasalahatan-kebahagiaan bersama (*al-maslahatul al-ammah, bonnum comune*) dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk



KEHIDUPAN NEGARA-BANGSA



TITIK TUMPU



TITIK TEMU



TITIK TUJU

Kunci Kebahagiaan

- **Menurut Martin Seligman**
- **P = Positive Emotion = Sila 1**
- **E = Engagement = Sila 2**
- **R = Relationship = Sila 3**
- **M = Meaningfulness = Sila 4**
- **A = Achievement = Sila 5**

SKEMA PEMBUDAYAAN PANCASILA

CAKUPAN PENETRASI	TATA NILAI	TATA KELOLA	TATA SEJAHTERA
KEYAKINAN			
PENGETAHUAN			
TINDAKAN			

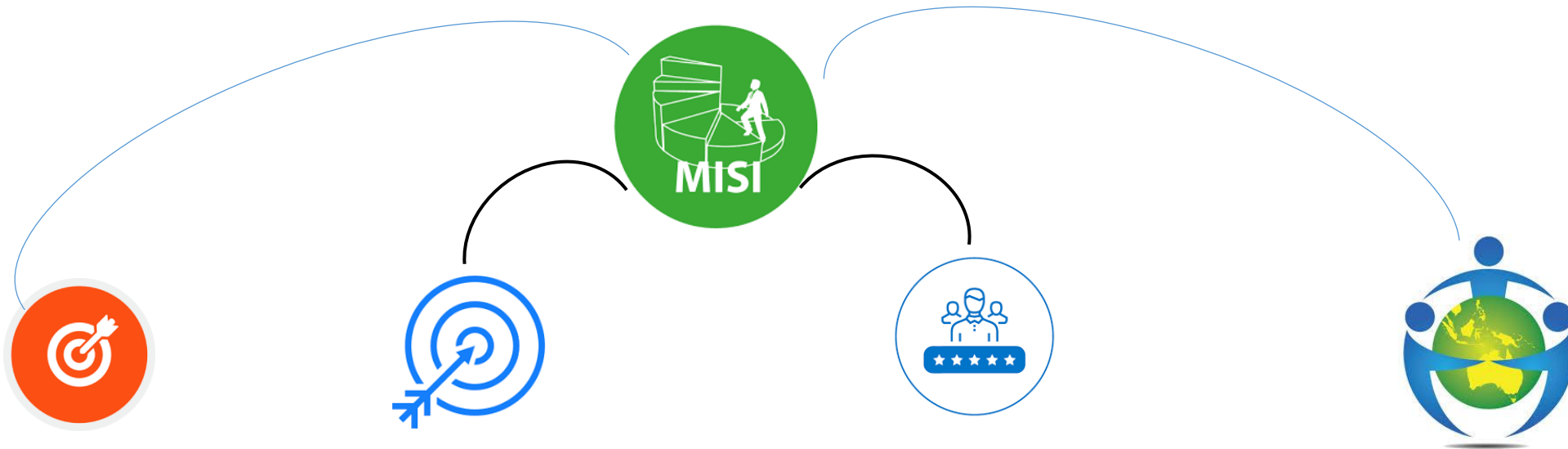
TRANSFORMASI SOSIAL BERBASIS PANCASILA



VISI DAN MISI BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA



Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



BHINNEKA TUNGGAL IKA

5 Isu Strategis

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2. INKLUSI SOSIAL

- Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial;
- Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama;
- Lemahnya budaya kewargaan;

4. PELEMBAGAAN PANCASILA

- Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya;
- Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan s/d perda;

1. PEMAHAMAN PANCASILA

- Wawasan Kesejarahan (Historis)
- Wawasan Konseptual
- Wawasan Yuridis
- Wawasan Visional
- Wawasan Implementatif (Dimensi Pengetahuan/Filosofis, Keyakinan dan Tindakan)

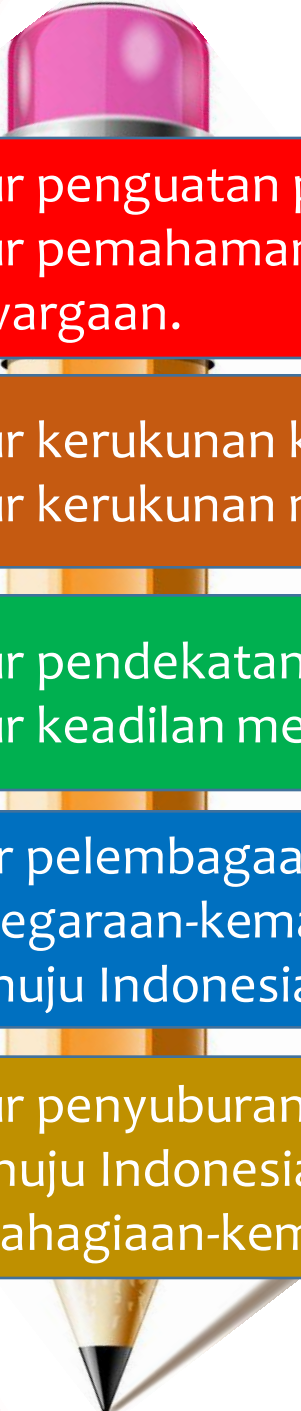
→ WAWASAN DASAR IDEOLOGI PANCASILA

3. Keadilan Sosial

- Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian & inklusi ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional;
- Masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) sosial dan ekonomi.

5. KETELADANAN PANCASILA

- Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik;
- Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat.



Jalur penguatan pemahaman Pancasila,
Jalur pemahaman menuju Indonesia cerdas
kewargaan.

1

Jalur kerukunan kebangsaan,
Jalur kerukunan menuju Indonesia bersatu.

2

Jalur pendekatan keadilan sosial,
Jalur keadilan menuju Indonesia berbagi kemakmuran.

3

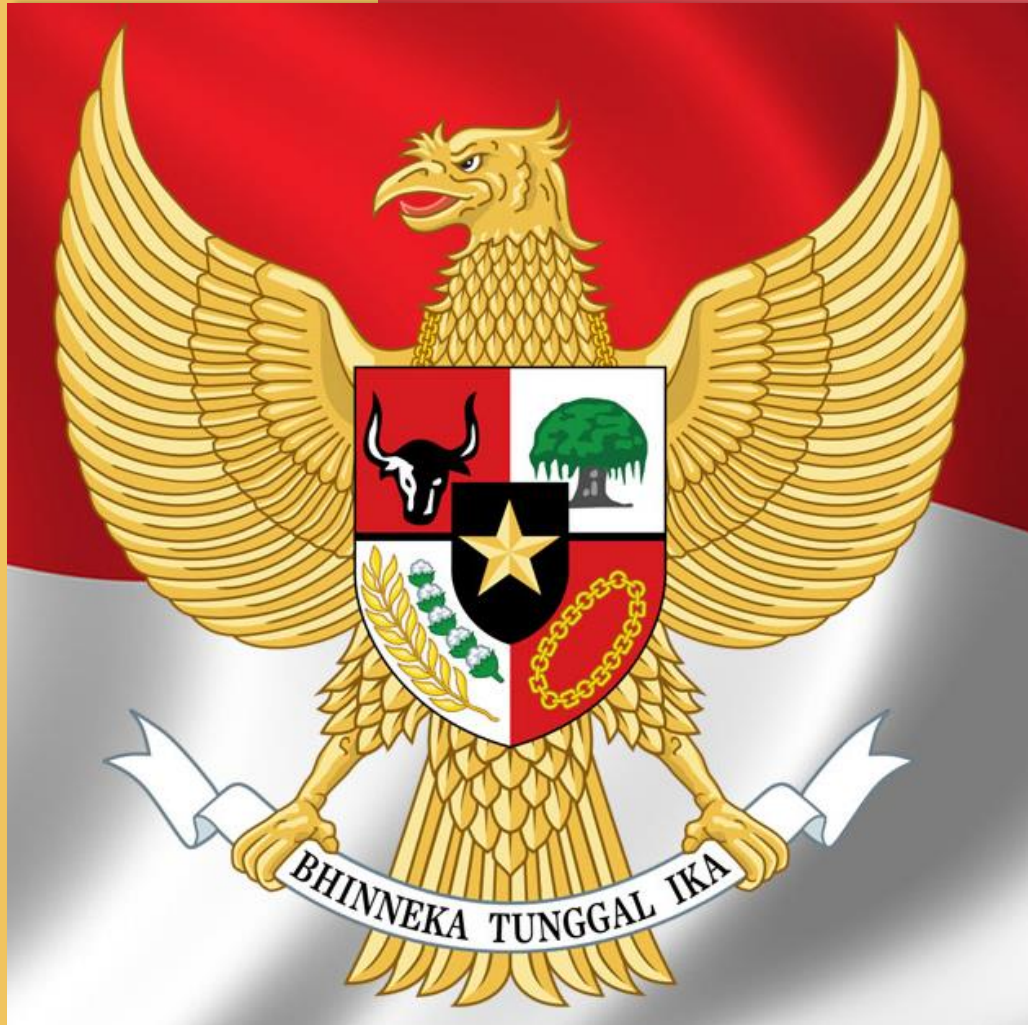
jalur pelebagaan Pancasila dalam pranata
kenegaraan-kemasyarakatan, Jalur pelebagaan
menuju Indonesia tertata-terlembaga.

4

Jalur penyuburan keteladanan, Jalur keteladanan
Menuju Indonesia terpuji. Itulah jalan
kebahagiaan-kemajuan hidup bersama"

5

**Kalau Pancasila
ingin menjadi
ideologi yang
bekerja (*working
ideology*),
setidaknya ada 5
jalur yang harus
diarungi:**



Pemahaman Pancasila

Pemahaman Pancasila

1

Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda

2

Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi

3

Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber-sumber otentik

4

Sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh K/L pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi

5

Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis

6

Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin



Inklusi Sosial

Inklusi Sosial

1

Arus globalisasi membawa kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas

2

Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial

3

Lemahnya budaya kewargaan

4

Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme

5

Lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial



Keadilan Sosial

Keadilan Sosial

1

Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan

2

Masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu

3

Meluasnya kesenjangan (disparitas) sosial antar pelaku ekonomi; antar daerah; antar bidang; antar sektor dan antar wilayah

Keadilan Sosial

4

Kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah

5

Tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial

6

Lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional

7

Masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi



Pelembagaan Pancasila



Pelebagaan Pancasila

1

Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya

2

Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

3

Masih berkembangnya bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila

4

Masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara



Keteladanan Pancasila

Keteladanan Pancasila

1

Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik

2

Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik

3

Kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik

4

Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat

5

Tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebajikan kehidupan publik

Keteladanan Pancasila



Farha Ciciek bersama suami mendirikan komunitas Tanoker Ledokombo, Festival Egrang menjadikan Desa Ledokombo dikenal di penjuru Indonesia adalah salah satu Ikon Prestasi UKP Pancasila



Bambang Irianto, pendiri kampung 3G (Glantung Go Green) di Malang adalah salah satu Ikon Prestasi UKP Pancasila



**Tindakan sebagai
Karakter Budaya
Kewargaan**

SKEMA PEMBUDAYAAN PANCASILA

CAKUPAN PENETRASI	TATA NILAI	TATA KELOLA	TATA SEJAHTERA
KEYAKINAN			
PENGETAHUAN			
TINDAKAN			

Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sebagai Karakter Budaya Kewargaan

- Bisa diringkas menjadi 25 butir. Masing-masing sila terdiri dari 5 butir nilai intrinsik.



Sila Pertama

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban.
2. Saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain.
4. Mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
5. Mengembangkan etika ketuhanan dan spiritualitas yang inklusif dalam kehidupan publik dengan menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan.



Sila Kedua

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.
3. Mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
4. Berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.
5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.



Sila Ketiga

1. Menunjukkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa (manusianya) dan seluruh tumpah darah Indonesia (alam semestanya).
2. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa-negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya.
5. Memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.



Sila Keempat

1. Menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.
2. Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur.
4. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
5. Mengemban peran publik secara bertanggung jawab.



Sila Kelima

1. Mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.
2. Suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
3. Bersama-sama memperjuangkan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.
4. Tidak melakukan kegiatan perekonomian yang memboroskan sumberdaya dan merugikan kesejahteraan umum.
5. Suka bekerja keras dan inovatif serta menghargai hasil karya orang lain.



1

Tindakan sebagai Karakter Kelembagaan Sosial-Politik

Kebersamaan Konsensual (Permusyawaratan)

2

Tindakan Sebagai Karakter Kelembagaan Ekonomi

Usaha bersama dengan semangat tolong-menolong (kooperasi)

TRANSFORMASI SOSIAL BERBASIS PANCASILA



Inti Moral Publik

Menurut Jonathan Haidt (2012)

Ada Enam nilai inti moral publik.

1. Care: peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama .
2. *Fairness*: rasa keadilan dan kepantasan.
3. Liberty: kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia.
4. Loyalty: kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama.
5. Authority: respek terhadap otoritas yang disepakati bersama.
6. Sanctity: menghormati nilai-nilai yang dipandang paling “suci” (utama).

Modal Sosial (Social Capital)

- **Modal jaringan-jaringan konektivitas dan inklusivitas sosial yang mampu menyatukan keragaman kepingan-kepingan kepentingan pribadi dan kelompok ke dalam suatu komunitas persaudaraan bersama, yang menjadi tumpuan rasa saling percaya (*mutual trust*).**
- **Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus diikat oleh kesamaan basis moralitas (*shared values*).**

Etika sebagai Basis Kemakmuran

- **Bisnis sebagai aktivitas sosial tak bisa lepas dari imperatif moral. Bahwa berbuat etis itu menciptakan rasa percaya (trust). Trust menumbuhkan hubungan yang kuat; dan dari hubungan itu lahirlah nilai (tambah). Bila kita bisa membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan serta mampu menciptakan nilai (tambah) secara efektif dan efisien, tak pelak lagi akan menghasilkan uang.**
- **Hidup etis dan bertindak etis itu bukanlah suatu kemewahan yang sia-sia; malahan bisa jadi sumber daya kunci yang powerful bagi pencapaian keunggulan kompetitif, yang dapat menumbuhkan kemakmuran secara lebih lestari.**

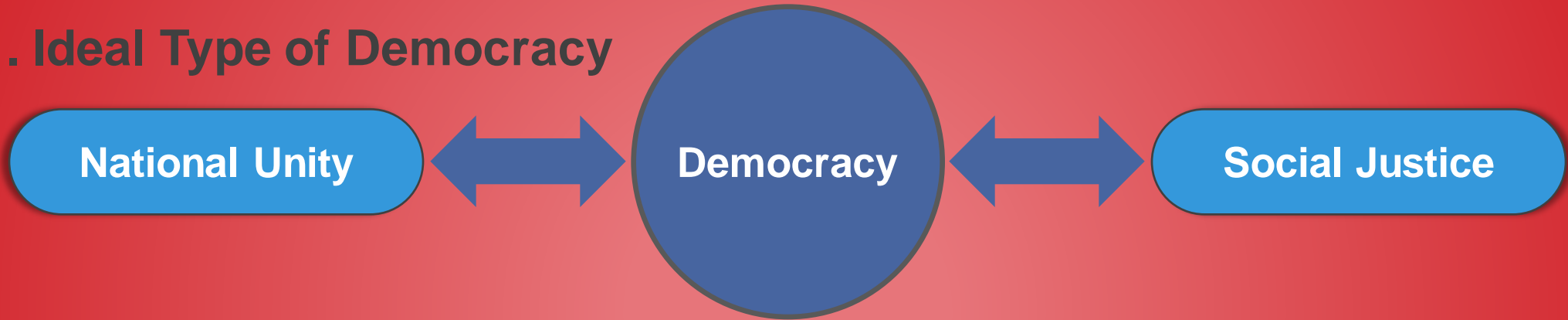
•

Kunci Kebahagiaan

- **Menurut Martin Seligman**
- **P = Positive Emotion = Sila 1**
- **E = Engagement = Sila 2**
- **R = Relationship = Sila 3**
- **M = Meaningfulness = Sila 4**
- **A = Achievement = Sila 5**

HEALTHY DEMOCRACY

#1. Ideal Type of Democracy



#2. Ideal Type of Democracy



Sosial Media Yudi Latif



@yudi.latif